

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Firda Febriana¹⁾, Kartika Rachma Sari²⁾, Nurhasanah³⁾

¹²³⁾Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

^{*2)}Corresponding Author: kartikasyahrul@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Palembang. Populasi pada penelitian ini adalah 32 OPD Kota Palembang sedangkan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* yang ditujukan pada para pegawai tiap OPD yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaporan anggaran. Metode pengumpulan data menggunakan survei kuesioner. Hasil penelitian ini secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Koefisien determinasi atau nilai *adjusted R²* sebesar 0,535 atau 53,5% variasi variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan. Sedangkan sisanya sebesar 46,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan.

Kata Kunci: kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah, sistem pelaporan, akuntabilitas kinerja.

Abstract

This study aims to determine the effect of budget target clarity, competence of local government apparatus and reporting system on performance accountability of Palembang City government agencies. The population in this study were 32 OPDs of Palembang City while the research sample used purposive sampling aimed at employees of each OPD who were directly involved in budget preparation and reporting. The data collection method used a questionnaire survey. The result of this study partially and simultaneously show that the clarity of budget targets, the competence of local government apparatus and the reporting system have a positive and significant effect on the accountability of government agency performance. The coefficient of determination of adjusted R² value of 0.535 or 53.5% of the variation in the dependent variable, namely the accountability government agency performance, can be explained by variations in three independent variables, namely budget target clarity, local government apparatus competencies and reporting systems. While the remaining 46.5% is explained by other variables outside the independent variables used.

Keywords: *clarity of budget targets, competence of local government apparatus, reporting system, performance accountability.*

1. PENDAHULUAN

Saat ini, instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan pencapaian keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai wujud dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) tertulis bahwa AKIP merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sebagai bentuk tanggungjawab, setiap instansi pemerintah

harus mempersiapkan, menyusun dan menyajikan data kinerja yang memuat berbagai pengungkapan informasi yang tertuang dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai instrumen dari pelaksanaan AKIP, yang berisi pencapaian gambaran kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Pembinaan peningkatan implementasi SAKIP Kota Palembang pada tahun 2022, Walikota Palembang menyebutkan bahwasannya pencapaian nilai AKIP untuk Kota Palembang saat ini belum begitu memuaskan dikarenakan nilai kinerja aparatur masih jauh dari standar (*Palembang.tribunnews.com*, 2022). Selama delapan tahun terakhir sampai dengan tahun 2021, nilai AKIP Kota Palembang berada pada kategori "B" (nilai 60-70). artinya hingga saat ini belum bisa mencapai sesuai target, yakni kategori "BB" ditahun 2021. Tahun 2022 pun nilai AKIP Kota Palembang masih berada pada kategori "B". Pencapaian implementasi SAKIP yang masih berada pada kategori "B" ini relatif masih cukup jauh untuk mencapai target tahun 2022 yaitu kategori "A" (nilai 80-90) yang juga merupakan target akhir RPJMD di tahun 2023.

Setiap instansi pastinya berupaya dengan optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, baik untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam setiap kegiatan instansi, semua bagian akan menjadi satu kesatuan yang harus saling mendukung untuk proses pencapaian keberhasilan dari pelaksanaan misi organisasi, oleh karena itu tiap satu kesatuan akan berusaha menyusun strategi-strategi sebagai petunjuk dalam mencapai target yang hendak dicapai.

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan suatu misi organisasi yaitu anggaran. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai program dan kegiatan suatu organisasi yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter atau uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran juga dapat dikatakan sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dalam penyusunannya membutuhkan data serta informasi untuk dijadikan bahan taksiran (Oktarina, 2019).

Pada tahun 2017 anggaran belanja daerah Kota Palembang dialokasikan sebesar Rp28,85 Trilyun dan terealisasi sebesar Rp28,77 Trilyun dengan rasio sebesar 92,86%. Tahun 2018 alokasi anggaran belanja sebesar Rp29,02 Trilyun dan terealisasi sebesar Rp28,88 Trilyun dengan rasio sebesar 87,34%. Tahun 2019 alokasi anggaran belanja sebesar Rp29,20 Trilyun dan terealisasi sebesar Rp29,00 Trilyun dengan rasio sebesar 82,80%. Tahun 2020 alokasi anggaran belanja sebesar Rp29,07 Trilyun dan terealisasi sebesar Rp28,93 Trilyun dengan rasio sebesar 87,57%. Tahun 2021 alokasi anggaran belanja sebesar Rp29,08 Trilyun dan terealisasi sebesar Rp28,89 Trilyun dengan rasio sebesar 82,85%. Tahun 2022 alokasi anggaran belanja sebesar Rp29,12 dan terealisasi sebesar Rp28,99 Trilyun dengan rasio sebesar 87,01%. Sehingga dapat diketahui berdasarkan rasio antara realisasi dan anggaran bahwa realisasi anggaran paling tinggi terjadi pada tahun 2017. Tentunya untuk mendapatkan realisasi anggaran yang maksimal harus diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2020-2021, Pemerintah Kota Palembang mencatat tujuh poin utama yang menjadi permasalahan SAKIP yang membutuhkan tindak lanjut, salah satu diantaranya yaitu laporan kinerja belum menyajikan secara lengkap analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja. Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Palembang harus dapat meningkatkan faktor-faktor yang menjadi evaluasi guna mendukung tercapainya AKIP yang lebih baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti beberapa variabel yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi AKIP, yaitu kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan.

2. TELAHAH LITERATUR

2.1 Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Bastian, 2009:39). Anggaran juga merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit

moneter yang meliputi seluruh kegiatan organisasi dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang (Fuad, dkk, 2020:2).

2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Rudi, 2019). Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka memudahkan tiap organisasi untuk menyusun rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, sehingga anggaran tersebut dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja yang artinya kualitas anggaran dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Penelitian (Wahid, 2016) dan (Andriani dan Wati, 2021) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap AKIP.

H₁: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP.

2.3 Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Pelaksanaan AKIP memerlukan peranan aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi guna tercapainya AKIP yang optimal. Kompetensi adalah karakteristik individu yang berkaitan dengan kinerja dan/atau unggul dalam situasi pekerjaan tertentu (Rahmat, 2019).

Aparatur pemerintah merupakan penyangga utama di dalam organisasi guna mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi tersebut (Faizal dan Yaya, 2018). Informasi yang disajikan oleh organisasi juga tentunya tidak lepas dari unsur manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan yang baik agar aparatur pemerintah dapat berkualitas dan memberikan kontribusi yang maksimal. Penelitian (Wahid, 2016) dan (Safitri, 2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap AKIP.

H₂: Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP.

2.4 Sistem Pelaporan

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu sama lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2016:2). Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran) (Abdullah dalam Anastasia, 2018). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara terstruktur dan sistematis pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja (PP 71, 2010). Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja. Penelitian (Anastasia, 2018) dan (Rahman dan Yusuf, 2021) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap AKIP.

H₃: Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP.

2.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan yang harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan (Nurkholis dan Khusaini 2019:14). Akuntabilitas adalah kewajiban setiap pihak pemegang kepercayaan (*agent*) untuk dapat memberikan pertanggungjawaban atas penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2021:27).

Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penelitian (Wahid, 2016) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap AKIP.

H_a: Kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses untuk menemukan hubungan antar variabel yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang hendak diketahui.

Populasi dalam penelitian ini adalah 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang, sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaporan anggaran yang terdiri dari 3 orang yakni kepala pimpinan/instansi, kepala sub bagian program/perencanaan dan kepala sub bagian keuangan dari masing-masing OPD dengan masa kerja jabatan minimal 1 tahun. Berikut tabel 1 menunjukkan daftar OPD Kota Palembang.

Tabel 1
Daftar OPD Kota Palembang

No	Nama Instansi
1	Sekretariat Daerah Kota
2	Sekretariat DPRD Kota
3	Inspektorat Daerah Kota
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Dinas Sosial
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10	Dinas Lingkungan Hidup

11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Dinas Kebudayaan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Dinas Tenaga Kerja
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23	Dinas Perikanan
24	Dinas Pariwisata
25	Dinas Perdagangan
26	Dinas Perindustrian
27	Satuan Polisi Pamong Praja
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
30	Badan Pendapatan Daerah
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Peraturan Daerah Kota Palembang No. 6 Tahun 2022

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Data diperoleh dari responden yang dikumpulkan melalui daftar pernyataan atau kuesioner terstruktur yang telah disediakan. Dari 96 kuesioner yang dibagikan ke 32 OPD Kota Palembang, kuesioner yang kembali hanya berjumlah 81 kuesioner.

3.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran (X_1), kompetensi aparatur pemerintah daerah (X_2), sistem pelaporan (X_3) dan variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

3.2 Model Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan terhadap variabel dependen yaitu AKIP. Selanjutnya untuk membuktikan hipotesis penelitian, dilakukan uji parsial (uji statistik t) dan uji simultan (uji statistik F). Data diolah dengan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	-5.884	4.40		-1.335	.186
			.8			
	KSA	.497	.098	.410	5.059	.000
	KAPD	.328	.117	.214	2.809	.006
	SP	.537	.093	.468	5.779	.000

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Berdasarkan tabel 2 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$AKIP = -5,884 + 0,497X_1 + 0,328X_2 + 0,537X_3$$

Keterangan:

AKIP : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

X₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA)

X₂ : Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (KAPD)

X₃ : Sistem Pelaporan (SP)

4.1.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian R² dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.743 ^a	.552	.535	4.0578

a. Predictors: (Constant), SP, KAPD, KSA

b. Dependent Variable: AKIP

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,535 yang artinya adalah 53,5% variabel AKIP dapat dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan. Sedangkan sisanya sebesar 46,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen yang digunakan.

4.1.2 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Berdasarkan pada tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,059 > 1,991$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap AKIP atau H₁ diterima.

Variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,809 > 1,991$ dengan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap AKIP atau H₂ diterima.

Variabel sistem pelaporan memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,779 > 1,991$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh terhadap AKIP atau H₃ diterima.

4.1.3 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Hasil pengujian dari uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1563.083	3	521.028	31.643	.000 ^b
	Residual	1267.850	77	16.466		
	Total	2830.933	80			

a. Dependent Variable: AKIP

b. Predictors: (Constant), SP, KAPD, KSA

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap AKIP atau H_4 diterima.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran terhadap AKIP

Pada tabel 2, t_{hitung} variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan nilai sebesar 5,059. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusannya, dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, dalam hal ini $5,059 > 1,991$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP diterima.

Bentuk pengaruh yang ditimbulkan yaitu positif, dimana meningkatnya kejelasan sasaran anggaran akan berpengaruh terhadap meningkatnya AKIP. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan oleh tiap instansi pemerintah, maka akan semakin baik pula AKIP. Sebaliknya, jika kejelasan sasaran anggaran buruk, maka AKIP juga akan berdampak buruk. Hasil penelitian ini selaras dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu Wahid (2016) dan Andriani & Wati (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap AKIP.

4.2.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap AKIP

Hasil uji statistik t yang terlihat pada tabel 2 menunjukkan nilai t_{hitung} untuk

variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah sebesar 2,809. Dimana jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, dalam hal ini $2,809 > 1,991$, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP diterima.

Bentuk pengaruh yang ditimbulkan yaitu positif, dimana meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah akan berdampak pada meningkatnya AKIP. Aparatur pemerintah merupakan penyangga utama dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan tiap organisasi, oleh sebab itu dibutuhkan pengelolaan yang baik agar aparatur pemerintah dapat berkualitas dan memberikan kontribusi yang maksimal. Hasil ini selaras dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu Wahid (2016) dan Safitri (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap AKIP.

4.2.3 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap AKIP

Hasil uji statistik t yang terlihat pada tabel 2 menunjukkan nilai t_{hitung} untuk variabel sistem pelaporan sebesar 5,779. Yang mana apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dalam hal ini $5,779 > 1,991$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP diterima.

Bentuk pengaruh yang ditimbulkan yaitu positif, tentunya peningkatan sistem pelaporan akan berdampak pula pada meningkatnya AKIP. Sistem pelaporan yang baik akan berbanding lurus dengan akuntabilitas kinerja, karena sistem pelaporan yang baik adalah jika laporan tersebut disusun secara jujur, tidak memihak pada suatu hal, terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini selaras dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu Anastasia (2018) dan Rahman & Yusuf (2021) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap AKIP.

4.2.4 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP

Berdasarkan tabel 4 yang menunjukkan hasil uji statistik F, dimana nilai F_{hitung} sebesar 31,643. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusannya, apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dalam hal ini $31,643 > 27,24$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_4 yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap AKIP diterima.

Bentuk pengaruh yang ditimbulkan yaitu positif, dimana meningkatnya kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan akan mempengaruhi meningkatnya AKIP. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Wahid (2016) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan terhadap AKIP.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang jelas dan spesifik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi tiap aparatur pemerintah tentunya akan semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang baik akan mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik juga.
4. Kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan secara

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. 2005. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewah Yogyakarta). *Kompak*, 13: 37-67.
- Anastasia, D. R. 2018. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan). *Doctoral Dissertation*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Andriani, G. A. A., & Wati, N. W. A. E. 2021. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2 (4): 418-436.
- Anjarawati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*: 1-7.
- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Faizal, Y. A., & Yaya, R. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada

- Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo). *Naskah Publikasi*: 1-18.
- Fathia, Nurul. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus SKPD Di Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1): 670-685.
- Hafiz, Muhammad. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1): 5280542.
- Irawati, A., & Agesta, C. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Auntansi dan Keuangan*, 10(1): 56-70.
- Mardiasmo. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. 2016. *Pengantar Manajemen*. Bogor: CV. In Media.
- Nurkholis & Khosaini, M.. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Pratama, Rio., dkk. 2019. Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Explorasi Akuntansi*. 1(1) seri d.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rahman, A., & Yusuf, M. 2021. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *YUME: Journal of Management*, 4(2).
- Rosmarie, Dinny. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Dinas SKPD Kabupaten Bandung Barat). *Doctoral Dissertation*. Universitas Komputer Indonesia.
- Wahid, Imam. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3(1).
- Yulianto, Rudi, Ahmad & Osmad Muthaheer. 2019. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 14, No. 2.